



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 87 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 87 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 440);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

- tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569)
 23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);

31. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 79 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 87 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 87), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 16 Agustus 2023

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 16 Agustus 2023

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,



DIRMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 43

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Ketentuan Pasal 1 Ayat (29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra menjadi dasar bagi PD untuk menyusun renja yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Renstra dapat diubah jika RPJMD mengalami perubahan. Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan daerah dan rencana PD. Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

RPJMD; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan rencana PD, terdiri atas Renstra PD dan Renja PD. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, sedangkan Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa menegaskan bahwa perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah tersebut diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014, dimana Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 79 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa, telah mengamanatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sumbawa sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan ekonomi sosial budaya.

Oleh karena itu dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu disusun sebuah Rencana Strategis (Renstra) untuk merencanakan pembangunan lima tahun ke depan. Rencana Strategis yang disingkat Renstra adalah suatu Dokumen perencanaan yang tertoleransi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 s/d 5 Tahun. Adapun fungsi Renstra adalah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dalam kurun waktu 1 s/d 5 Tahun.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa ini merupakan salah satu bentuk upaya implementasi visi Bupati Sumbawa yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa 2021-2026, yaitu: *"Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban"*, serta pokok-pokok pikiran misi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa, khususnya keterkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa, adalah misi ke-3 yaitu Sumbawa Bersih dan Melayani Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien

dan Misi ke-4 yaitu Sumbawa Aman dan Berbudaya Mewujudkan masyarakat yang beriman, berkarakter, terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum dan terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan

Di samping itu, agar penyelenggaraan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Sumbawa dapat bersinergi dengan penyelenggaraan pembangunan nasional, penyusunan Renstra Badan Kesbangpol selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026, juga memperhatikan Renstra Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra PD ini dilaksanakan berdasarkan dan/atau memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sumbawa 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
 22. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 79 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa memiliki maksud dan tujuan, hal ini sesuai Pasal 13 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, serta akan menjadi pedoman bagi PD untuk penyusunan Renja PD. Adapun maksud dan tujuan yang terperinci adalah:

1. Maksud disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 adalah:
 - a. Sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa dalam menyusun program dan kegiatan dalam pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik selama 5 (lima) tahun kedepan;
 - b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa dalam perencanaan jangka menengah;

- c. Untuk menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa yang transparan dan akuntabel.
2. Tujuan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 adalah :
 - a. Mewujudkan visi dan misi kepala daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik secara sistematis, sinergis, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. Mewujudkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa ke dalam program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis, sinergis, terpadu dan berkesinambungan;
 - c. Mewujudkan perencanaan, pemilihan program dan kegiatan serta prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2021-2026;
 - d. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan Sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi Misi Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan, indikator tujuan, sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator dan target kinerja setiap tahun

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan strategi dan arah kebijakan yang di ambil perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif masing- masing program dan kegiatan prioritas.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang termuat di dalam RPJMD

BAB VIII

PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 79 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa, adalah mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan ekonomi sosial budaya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan ekonomi sosial budaya;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan ekonomi sosial budaya;
3. Pengkoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan ekonomi sosial budaya;
4. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesatuan bangsa, politik dan ketahanan ekonomi sosial budaya;
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 79 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawasebagai berikut:

1. Kepala Badan

Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik serta dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan

kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dalam penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset;
- e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Sekretaris Badan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. memverifikasi bahan kebijakan perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- d. mensosialisasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- e. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- f. menyiapkan bahan penyusun rencana strategis Badan;
- g. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan Badan;
- h. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan;
- i. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- j. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;

- k. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Badan dan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan;
 - l. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - m. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
 - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.
- Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan

situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi merupakan suatu garis hirarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun organisasi, dimana setiap individu atau Sumber Daya Manusia pada lingkup organisasi tersebut kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa menurut Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 79 Tahun 2020 dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,

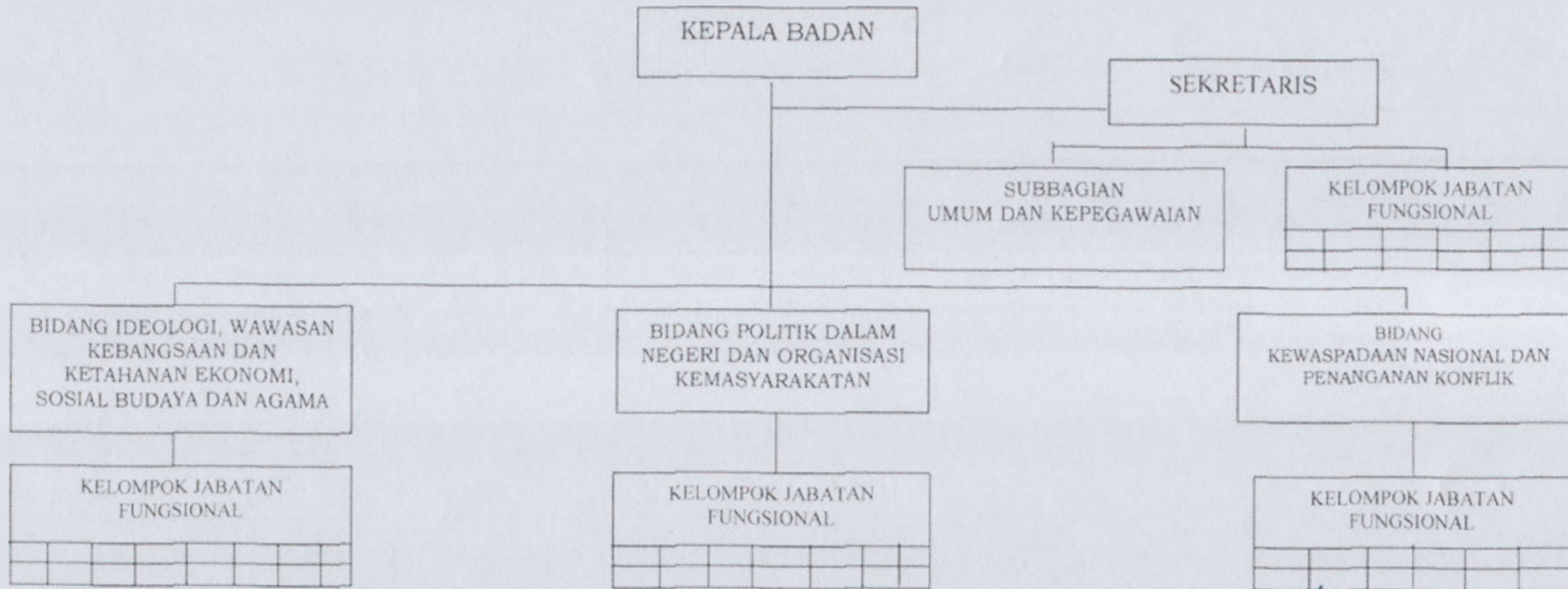
Sosial Budaya dan Agama, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa merupakan gambaran dari Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 79 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa diubah. dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi pada Gambar 2.2. adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

STUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMBAWA



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Peningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa, Apabila merujuk pada analisis kebutuhan pegawai yang merupakan proses perhitungan logis dan terukur untuk menentukan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugasnya. Data perkiraan kebutuhan ASN Tahun 2021-2026 tersaji pada data tabel. Kondisi ASN sampai bulan Desember 2020. dapat dilihat pada Tabel 2.3.1:

Tabel 2.3.1:

Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil)	18
Pegawai Honorer	4
Sukarela	2
Jumlah	24

Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Pangkat/Golongan	Jumlah
Pembina Tk.I (IV/b)	2
Pembina (IV/a)	3
Penata Tk.I (III/d)	5
Penata (III/c)	4
Penata Muda Tk.i (III/b)	1
Pengatur Tk.I (II/d)	2
Pengatur (II/c)	1
Pegawai Honorer	4
Sukarela	2
Jumlah	24

Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
Strata 2	1
Strata 1	14
Diploma 3	2
SLTA	6
SLTP	1
SD	-
Jumlah	24

**TABEL PERKIRAAN KEBUTUHAN ASN
TAHUN 2021-2026**

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEGAWAI YANG ADA 2021	JUMLAH ASN YANG PENSI 2021-2025					KEBUTUHAN ASN 2021-2025					USALAN PENGISIAN FORMASI ASN				
			21	22	23	24	25	21	22	23	24	25	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Kepala Badan	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
2.	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
	Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
	JFU	2	-	-	-	-	-	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3
3.	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial Budaya dan Agama	1	-	-	-	-	-										
	Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
	Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
	JFU	1	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
4.	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-
	Subbid Poldagri Negeri	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
	Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
	JFU	1	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2

5.	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
	Sub. Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama intelejen	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
	Sub. Bidang Penanganan Konflik	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-
	JFU	1	-	1	-	-	-	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
	JUMLAH	18						25	25	25	25	25	7	9	7	7	7

Uraian dari tabel tentang Perkiraan Kebutuhan Asn Tahun 2021-2026 tersebut diatas, dan dapat dijelaskan, bahwa tingkat kebutuhan Aparatur Sipil Negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa sejumlah 25 orang dengan rincian 3 orang pejabat struktural dan 4 orang JFU.

2.2.1. Aset/Modal

Aset/Modal merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Aset merupakan hal paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Aset harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan aset yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai. Paradigma baru pengelolaan aset juga menekankan pada penciptaan nilai tambah dari aset yang dimiliki dan dikelola.

Pengelolaan aset tetap yang baik guna menghasilkan informasi dalam penyusunan laporan keuangan pada akhirnya tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar/sumber dalam pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini Pemendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan turunan dari PP No. 27 tahun 2014.

Pelaksanaan pengelolaan aset/modal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah. Peraturan mengenai pengelolaan teknis barang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa selaku Kuasa Pengguna Barang telah melaksanakan penertiban aset melalui kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa di dukung oleh aset/modal.

Aset/modal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa berdasarkan jenis aset sesuai data pada KIB s.d. Tahun 2020, terdiri atas Aset Tanah, Aset Mesin dan Peralatan, Aset Gedung dan Bangunan dan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan. Berikut disajikan data aset/modal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa dapat dilihat pada data Kartu Inventaris Barang (KIB) berikut ini:

REKAPITULASI

KARTU INVENTARIS BARANG/KIB

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.18.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Register				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	1.280,00	1996	Jalan Bungur No. 2 Sumbawa Besar	Hak Pakai	25/10/2005	28	Kantor Bakesbangpolinmas	Pembelian	259.840,00	Tanah Bangunan Kantor Kesbang
Jumlah Harga												259.840,00	

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.18.01.01.01

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02.01.03.05.010	Pompa Air	000004	-		Besi	2012						Pembelian	1.400,00	
2	02.02.01.01.003	Station Wagon	000002	ISUZU / TBR541 LM25	2499		2003		MHCTBR54F3K249 025	E249025	EA 1124 AA	5578994.0	Pembelian	90.000,00	
3	02.02.01.01.003	Station Wagon	000004	Toyota / Avanza Veloz			2019		MHKM5FA4JKK059 472	2NR-F932395	EA		Pembelian	239.450,00	Mutasi dari Setda
4	02.02.01.03.003	Yeengler/Trailer	000001	Kawasaki SPM R 2		besi	2013		MH4LX150CDKP76 839	LX150CEPB7837	EA 3149 AA		Pembelian	30.959,50	Mutasi dari Setda
5	02.02.01.03.003	Yeengler/Trailer	000002	Kawasaki SPM R 2		besi	2013		MH4LX150CDKP60 60	LX150CEPB8240	EA 3145 AA		Pembelian	30.959,50	Mutasi dari Setda
6	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000003	Honda Win	97	Besi	1996		MH1HABOOITTK00 3701	HARE-1003709	EA 2504 AA		Pembelian	3.000,00	
7	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000005	Suzuki/Tander		Besi	2008						Pembelian	10.000,00	
8	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000006	Honda / Wln 100	100 cc		1989						Pembelian	10.000,00	
9	02.03.02.03.004	perkakas bengkel service lainnya (dst)	000001 s/d 000002	Masada MS 2			2017						Pembelian	2.000,00	
10	02.03.03.07.010	Scanner (Universal Tester)	000002	Canon		Piber glass	2009						Pembelian	850,00	
11	02.04.01.04.005	Lemari Penyimpan	000002			Kayu	2009						Pembelian	3.419,50	Almari Arsip
12	02.04.01.04.005	Lemari Penyimpan	000003			Serabut kayu	2011						Pembelian	2.400,00	
13	02.04.01.04.005	Lemari Penyimpan	000004			Seabut kayu	2012						Pembelian	1.990,00	

14	02.04.01.04.005	Lemari Penyimpan	000005	-	Serabut kayu	2012						Pembelian	1.997,40	
15	02.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	000001	Broter 2000 DLX		2014						Pembelian	2.000,00	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor
16	02.05.01.02.001	Mesin Hitung Manual	000001	Kawachi	Besi	2013						Pembelian	306,00	
17	02.05.01.04.007	Brandkas	000003	Tiger	Besi	2010						Pembelian	5.000,00	
18	02.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama	000001	-	Triplek	2011						Pembelian	1.000,00	
19	02.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama	000002	-	Triplek	2012						Pembelian	500,00	
20	02.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama	000003	Kayu pakai kaca	Triplek	2013						Pembelian	1.000,00	Papan Visual Data Base Parpol
21	02.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama	000004	-		2015						Pembelian	1.400,00	
22	02.05.01.05.005	White Board	000001	Papan Struktur	Triplek	2010						Pembelian	1.500,00	
23	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	000001	Innovation		2013						Pembelian	4.500,00	
24	02.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	000024 s/d 000040	Chitose	Besi	1999						Pembelian	918,00	Rusak Berat
25	02.05.02.01.013	Meja Podium	000001	-	Rangka kayu, alas stan fand	2015						Pembelian	1.950,00	
26	02.05.02.01.017	Meja Panjang	000004 s/d 000009	-	Kayu	1977						Pembelian	3.384,00	
27	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000001	-	Kayu	2001						Pembelian	1.128,00	
28	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000001	-	stanlies	2016						Pembelian	4.932,00	
29	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000003	Jati		2013						Pembelian	7.900,00	
30	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000004	Ukiran Jepara	Kayu, alas busa	2016						Pembelian	7.829,00	
31	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000005	-		2017						Pembelian	4.000,00	kursi tunggu besi
32	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000006	-	Kayu	2019						Pembelian	9.189,60	Pengadaan Kursi Tamu + Honor Pejabat Pengadaan Barabg Jasa
33	02.05.02.02.003	Jam Elektronik	000003	-		2015						Pembelian	240,00	
34	02.05.02.04.001	Lemari Es	000001	Sarf Lemon / SJ-M127-TS		2014						Pembelian	2.200,00	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor
35	02.05.02.04.003	A.C. Window	000001	Toshiba		2000						Pembelian	3.680,00	
36	02.05.02.04.003	A.C. Window	000002	Toshiba		2001						Pembelian	2.632,00	
37	02.05.02.04.004	A.C. Split	000001	LG / SU12LFG		2013						Pembelian	6.600,00	
38	02.05.02.04.004	A.C. Split	000002	LG	220-240V-50HZ	2016						Pembelian	6.600,00	
39	02.05.02.04.004	A.C. Split	000003	sharp	plastik	2017						Pembelian	14.320,00	AC + Honorarium Tim

66	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000004	Triplek, Pintu Kaca		2015		Pembelian	1.700,00	
67	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000005 s/d 000006	Lokal	Kayu	2016		Pembelian	4.100,00	
68	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000007	Lokal	Kayu	2016		Pembelian	2.050,00	
69	02.06.01.02.003	Camera Electronic	000001	Canon		2014		Pembelian	3.300,00	Kamera digital
70	02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	000002	Acer	Plastik	2016		Pembelian	6.100,00	
71	02.06.02.01.003	Pesawat Telephone	000002	Panasonic		2013		Pembelian	625,50	
72	02.06.02.01.010	Facsimile	000001	Panasonic / KX-FP701CX		2014		Pembelian	3.000,00	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor
73	02.09.01.10.015	Dispercer	000002 s/d 000003	Polytron		2010		Pembelian	3.424,09	
74	02.10.01.02.001	P.C Unit	000010			2012		Pembelian	14.600,00	
75	02.10.01.02.001	P.C Unit	000011	Acer / LED 15,6 Inch/40 Cm		2013		Pembelian	10.400,00	
76	02.10.01.02.001	P.C Unit	000012	LS.190.300	plastik	2017		Pembelian	14.250,00	
77	02.10.01.02.002	Lap Top	000001 s/d 000004	Asus X441UB(i3)		2019		Pembelian	43.600,00	Pengadaan Laptop + Honor PPK
78	02.10.01.02.003	Note Book	000003	Sony Vaio		2012		Pembelian	15.000,00	
79	02.10.01.02.003	Note Book	000004	Lenovo G400		2014		Pembelian	6.950,00	Pengadaan Komputer
80	02.10.01.02.003	Note Book	000005	Asus X451CAP		2014		Pembelian	11.450,00	Pengadaan Komputer 9.850.000 + honor pemeriksa Barang 1.600.000.
81	02.10.01.02.003	Note Book	000006			2015		Pembelian	8.000,00	
82	02.10.01.02.003	Note Book	000007	Asus	PLastik	2016		Pembelian	9.800,00	Di Ruang Sekretans
83	02.10.01.02.003	Note Book	000008	Asus	PLastik	2016		Pembelian	9.800,00	
84	02.10.01.02.003	Note Book	000009	Asus	PLastik	2016		Pembelian	9.800,00	Di Ruang Sekretaris
85	02.10.01.02.003	Note Book	000010	Asus	PLastik	2016		Pembelian	9.800,00	
86	02.10.01.02.003	Note Book	000011	Acer Aspire ES II	plastik	2017		Pembelian	9.425,00	
87	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000011	Canon PIXMA MP237		2013		Pembelian	1.200,00	
88	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000012	Canon MP237		2015		Pembelian	3.000,00	
89	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000013	Canon Pixma	Plastik	2016		Pembelian	1.460,00	di Ruang Sekretaris
90	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal	000014	Canon Pixma	Plastik	2016		Pembelian	1.460,00	

91	02.10.02.03.003	Komputer) Printer (Peralatan Personal Komputer)	000015 s/d 000016	Canon Pkma	Plastik	2016						Pembelian	2.920,00	di Ruang Sekretaris
92	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000017 s/d 000018	HP Desk Jet 2135	plastik	2017						Pembelian	3.112,00	
93	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000019	Epson L360 Scan / Epson L360 Scan		2018						Pembelian	6.625,90	Printer + Honorarium Tim Pemeriksa Barang
94	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000020 s/d 000024	Epson L3110		2019						Pembelian	22.850,00	Pengadaan Printer + Honor PPHP
95	02.10.02.03.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	000001			2014						Pembelian	1.450,00	Pengadaan Komputer
Jumlah Harga													861.200,49	

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.18.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000001	Baik		Beton	268	Jalan Bungur No 2 Sumbawa Besar Kecamatan Lunyuk				Tanah Milik Pemda	01.01.01.04.001.0001	Pembelian	392.093,00	Gedung Kantor
2	Gedung Pos Jaga Permanen	03.01.01.13.001	000001	Baik	Tidak	Beton			07/09/2015			Tanah Milik Pemda		Pembelian	72.783,00	Bangunan Pos Jaga + Honor pengadaan
3	Taman Permanen	03.01.01.36.001	000001	Baik		Tidak	260	Jalan Bungur No. 2 Smbawa Besar Kecamatan Lunyuk				Tanah Milik Pemda		Pembelian	5.850,00	Tempat Parkir
4	Pagar Permanen	03.04.01.04.001	000001	Baik		Tidak						Tanah Milik Pemda		Pembelian	137.814,00	Pembangunan Pagar Keliling dan sisa Pekerjaan Pos Jaga/Ronda
5	Pagar Permanen	03.04.01.04.001	000002	Baik	Tidak	Beton		Jln. Bungur						Pembelian	98.500,40	Pagar Kantor + honorarium
Jumlah Harga															707.040,40	

O. KODE LOKASI : 12.15.06.18.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Bangunan (P, SP, D)	Konstruksi Bangunan		Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Tgl, Bln Thn Mulai	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal-usul Pembiayaan	Nilai Kontrak (ribuan Rp)	Keterangan
			Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Tidak	Beton		Jln Bungur No. 2 Sumbawa Besar	01/01/1900		25/10/2016	Tanah Milik Penda		Pembelian	40.866,00	Rencana Pembuatan Gedung Kantor Badan Kesbangpoldagri
Jumlah Harga													40.866,00	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Realisasi program, kegiatan dan capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa dalam 5 (lima) tahun periode Renstra SKPD Tahun 2016-2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Karakter Kebangsaan
Pentingnya menjaga Pancasila sebagai konsensus nasional dan payung kebangsaan serta menumbuh kembangkan pemahaman segenap elemen masyarakat terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia dilaksanakan dengan kegiatan penyuluhan wawasan kebangsaan kepada masyarakat dan pembinaan kesadaran masyarakat dalam bela Negara, adapun hasil yang dicapai yaitu:
 - a. Memasyarakatkan lima sila Pancasila dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan bela Negara.
2. Program Peningkatan Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Program Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Pentingnya pendidikan Budaya Politik dan Etika Demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat dengan tujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pesta Demokrasi dilaksanakan dengan kegiatan antara lain: Penyuluhan politik kepada masyarakat, penyusunan data base partai politik, koordinasi forum diskusi politik, verifikasi persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik dan fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik. Hasil yang dicapai antara lain:
 - a. Adanya peningkatan pemahaman masyarakat akan politik yang demokratis;
 - b. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memberikan hak suara dalam kegiatan Pemilu dan Pilkada;
 - c. Tersedianya data base partai politik;
 - d. Terlaksananya koordinasi forum-forum diskusi politik;
 - e. Terlaksananya pemberian bantuan keuangan partai politik.
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
Terciptanya harmonisasi antara organisasi masyarakat dengan pemerintah, membangun kekompakan antara Ormas/LSM dan pemerintah yang melibatkan beberapa stakeholder antara lain TNI, Polri, Kejari, Satpol PP dan unsur Intelejen dalam menjaga stabilitas wilayah dilaksanakan dengan kegiatan antara lain pembentukan/fasilitasi/koordinasi dan pendataan/sosialisasi/pendaftaran Ormas/LSM. Hasil yang dicapai antara lain:
 - a. Adanya peningkatan pemahaman dan aktualisasi masyarakat akan Pancasila;
 - b. Tersosialisasinya undang-undang tentang Ormas, terdaftar dan tersedianya data ormas/LSM.
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Meningkatkan persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat pada kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan meminimalisir penghayat kepercayaan serta peningkatan upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika di kalangan masyarakat serta hasil yang dicapai dalam kegiatan tersebut yaitu :
 - a. Adanya peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat;

- b. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
 - c. Adanya peningkatan toleransi dan kerukunan masyarakat dalam kehidupan beragama
 - d. Meminimalisir jumlah penganut penghayat kepercayaan
 - e. Menurunkan jumlah pengguna narkoba.
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penangan Konflik Sosial
- Meningkatkan ketahanan masyarakat dan konsifitas daerah yang dilaksanakan dala kegiatan koordinasi komunitas intelegen daerah (Kominda), Forumkoordinasi pimpinan daerah(Forkopinda),dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta kordinasi/fasilitasi penanganan konflik sosial. Adapun hasil yang dicapai antara lain :
- a. Terlaksananya koordinasi komunitas intelegen daerah(Kominda)
 - b. Terlaksananya koordinasi/pertemuan pimpinan daerah
 - c. Terbentuk dan terbinanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
 - d. Menurunnya konflik sosial dimasyarakat.

Capaian kinerja pelayanan dan realisasi pendanaan terkait tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Sumbawa dalam 5 (lima) tahun periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel T-C. 23 dan Tabel T-C.24.

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumbawa
Tahun 2016 - 2020

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Capaian Perangkat Daerah Tahun Ke-				
					(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	(1) Th. 2016	(2) Th. 2017	(3) Th. 2018	(4) Th. 2019	(5) Th. 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1		Penyediaan Jasa surat menyurat	8.971.000	9.240.000	9.518.000	9.804.000	20.717.954	5.583.854	8.970.954	18.317.954	5.362.565	20.717.954	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		2		Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	14.669.000	15.109.000	15.562.000	16.029.000	24.268.800	10.888.859	11.738.545	16.897.089	44.268.800	24.268.800	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		3		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	55.639.000	57.308.000	59.027.000	60.798.000	46.376.273	31.793.263	43.677.211	21.387.287	23.886.855	46.376.273	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		4		Penyediaan jasa administrasi Keuangan	76.543.000	78.839.000	81.204.000	83.640.000	77.737.633	60.220.000	77.542.653	76.837.633	77.737.633	77.737.633	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
				Terlaksananya Administrasi Keuangan untuk seluruh kegiatan Badan															

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Capaian Perangkat Daerah Tahun Ke-				
					(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	(1) Th. 2016	(2) Th. 2017	(3) Th. 2018	(4) Th. 2019	(5) Th. 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Terjaminnya kebersihan lingkungan kantor	2.837.000	2.922.000	3.010.000	3.100.000	2.935.849	2.500.000	2.836.649	2.935.849	3.740.849	2.935.849	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor		Terlaksananya perbaikan rutin/berkala peralatan kerja Badan	5.000.000	5.150.000	5.305.000	5.464.000	7.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Terwujudnya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang siap pakai sebagai pendukung kegiatan skpd	2.578.000	2.655.000	2.735.000	2.817.000	1.916.450	1.500.950	2.577.750	1.916.450	2.916.450	1.916.450	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	8	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan.		Meningkatnya wawasan aparat	4.242.000	4.370.000	4.500.000	4.635.000	4.242.000	3.640.000	3.280.000	3.440.000	4.242.000	4.242.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Capaian Perangkat Daerah Tahun Ke-				
						(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	(1) Th. 2016	(2) Th. 2017	(3) Th. 2018	(4) Th. 2019	(5) Th. 2020
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		9	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah beserta pelaporannya	96.652.000	99.552.000	102.539.000	105.615.000	149.555.803	141.339.449	147.417.803	112.334.660	87.525.803	149.555.803	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor		Kenyamanan Aktivitas Inerja Aparatur	31.929.000	31.929.000	31.929.000	31.929.000	55.000.000	30.769.038	25.095.163	13.915.563	25.015.563	55.000.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		2	Pengadaan Mebeleur		Terciptanya kelancaran kinerja aparatur	52.533.000	52.533.000	52.533.000	52.533.000	35.973.750	52.056.400	-	-	35.973.750	35.973.750	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		3	Pengadaan komputer		Meningkatnya kelancaran pelayanan	46.536.000	46.536.000	46.536.000	46.536.000	60.276.000	45.652.760	27.357.885	-	60.276.050	60.276.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		4	Rehabilitasi sedang/ beratrumah/gedung kantor		Terwujudnya prasarana operator yang memadai	42.125.000	42.125.000	42.125.000	42.125.000	119.901.285	42.124.543	13.690.543	-	-	119.901.285	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Capaian Perangkat Daerah Tahun Ke-						
					(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	(1) Th. 2016	(2) Th. 2017	(3) Th. 2018	(4) Th. 2019	(5) Th. 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Tersedianya Dokumen Laporan SKPD	2.615.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000	15.214.685	3.194.310	2.569.685	2.614.685	14.009.885	15.214.685	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran				6.763.000	6.763.000	6.763.000	6.763.000	1.681.050	10.622.409	2.658.050	1.681.050	860.550	1.681.050	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tersedianya laporan keuangan untuk seluruh kegiatan akhir tahun.				2.577.000	2.577.000	2.577.000	2.577.000	1.918.640	2.454.776	2.576.640	1.916.640	1.270.640	1.918.640	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tersedianya laporan keuangan untuk seluruh kegiatan akhir tahun.				22.849.000	22.849.000	22.849.000	22.849.000	27.329.248	22.489.176	22.839.248	27.329.248	18.579.248	27.329.248	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Capaian Perangkat Daerah Tahun Ke-					
						(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	(1) Th. 2016	(2) Th. 2017	(3) Th. 2018	(4) Th. 2019	(5) Th. 2020	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
IV	Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1	Penyusunan An RKA/DPA SKPD			Tersedianya Rencana kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang memadai.	20.831.000	20.831.000	20.831.000	20.831.000	56.903.370	21.510.715	14.235.235	25.703.370	25.707.245	56.903.370	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		2	Penyusunan An Rencana Strategis Dan Rencana Kerja Tahunan SKPD			Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Tahunan	7.364.000	7.364.000	7.364.000	7.364.000	36.318.078	6.081.378	13.768.955	18.493.978	30.318.078	36.318.078	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
V	Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama			Meningkatnya Toleransi dan Kerukunan umat beragama dikalangan masyarakat.	22.777.000	22.777.000	22.777.000	22.777.000	28.384.567	24.870.067	22.316.667	16.008.955	28.338.967	28.384.567	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Capaian Perangkat Daerah Tahun Ke-					
						(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	(1) Th. 2016	(2) Th. 2017	(3) Th. 2018	(4) Th. 2019	(5) Th. 2020	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat.			Meningkatnya solidaritas dikalangan masyarakat.	11.847.000	11.847.000	11.847.000	11.847.000	26.849.515	19.130.015	11.629.065	12.011.565	10.389.515	26.849.515	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		3	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Luhur Budaya Bangsa.			Meningkatnya Kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa.	11.847.000	11.847.000	11.847.000	11.847.000	30.062.508	22.823.008	11.847.058	12.277.058	15.049.158	30.062.508	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		4	Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM.			Terpenuhiya kualitas pengurus FKDM.	27.009.000	27.009.000	27.009.000	27.009.000	65.638.210	55.218.385	26.018.826	31.167.426	90.965.710	65.638.210	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Capaian Perangkat Daerah Tahun Ke-				
						(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	(1) Th. 2016	(2) Th. 2017	(3) Th. 2018	(4) Th. 2019	(5) Th. 2020
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	Monitorin g. Pembinaan dan Pendaftaran Ormas dan LSM.			Terdatanya pendaftaran ormas.	33.948.000	33.948.000	33.948.000	33.948.000	91.376.055	85.036.082	41.083.159	114.720.459	94.931.859	91.376.055	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	6	Pembinaan Kesadaran Bela Negara			Meningkatnya kesadaran pengurus PKK terhadap Negara	9.783.000	9.783.000	9.783.000	9.783.000	28.838.150	19.169.650	9.782.700	11.912.700	12.266.850	28.838.150	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	7	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan FKUB			Terjalinya Sikap Toleransi antar Umat Beragama	16.342.000	16.342.000	16.342.000	16.342.000	35.150.925	16.264.050	16.265.475	18.748.550	29.685.425	35.150.925	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Capaian Perangkat Daerah Tahun Ke-					
					(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	(1) Th. 2016	(2) Th. 2017	(3) Th. 2018	(4) Th. 2019	(5) Th. 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	8	Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila			Meningkatnya pemahaman nilai pancasila dikalangan masyarakat	10.909.000	10.909.000	10.909.000	10.909.000	28.769.175	17.322.125	10.908.725	11.814.225	16.701.175	28.769.175	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	8	Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)			Meningkatnya pengetahuan pendidikan wasbang	122.987.000	122.987.000	122.987.000	122.987.000	117.382.826	-	-	18.748.550	24.923.000	117.382.826	-	-	1,00	1,00	1,00
	9	Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan			Meningkatnya kesadaran sikap masyarakat menerima kemajemukan	17.157.000	17.157.000	17.157.000	17.157.000	29.663.150	-	-	18.895.200	18.679.150	29.663.150	-	-	1,00	1,00	1,00

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Capaian Perangkat Daerah Tahun Ke-				
						(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	(1) Th. 2016	(2) Th. 2017	(3) Th. 2018	(4) Th. 2019	(5) Th. 2020
I	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		10	Sosialisasi Peraturan Perundangan		Meningkatnya pemahaman peraturan perundang-undangan	-	10.909.000	10.909.000	10.909.000	28.626.322	-	-	-	-	28.626.322	-	-	-	-	1.00
VI	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1	Pelaksanaan kirab Pataka		Terciptanya hubungan yang baik dikalangan masyarakat.	124.527.000	122.987.000	122.987.000	122.987.000	-	99.541.964	122.699.864	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-
		2	Monitoring ketahanan Sumber Daya Alamperdagangan Anekonomi.		Termonitornya perdagangan dan perekonomian masyarakat.	12.352.000	17.157.000	17.157.000	17.157.000	43.407.185	40.937.160	12.352.110	26.227.160	43.407.185	43.407.185	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Capaian Perangkat Daerah Tahun Ke-				
						(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	(1) Th. 2016	(2) Th. 2017	(3) Th. 2018	(4) Th. 2019	(5) Th. 2020
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3	Koordinasi Intelijen Daerah (Kominda)		Terlaksananya koordinasi Tim kominda	107.87 0.000	107.87 0.000	107.870 .000	107.870 .000	-	117.91 2.433	182.68 4.783	307.587 .624	-	-	1.00	1.00	1.00	-	-
		4	Koordinasi Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Terciptanya Kondusifitas Wilayah	86.492. 000	86.492 .000	86.492. 000	86.492. 000	77.372. 536	75.856 .136	73.640 .036	80.518. 036	68.522. 536	77.372. 536	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		5	Pembangunan Pos Jaga Terpadu		Bangunan pos jaga terpadu yang dibangun	150.00 0.000	150.00 0.000	150.000 .000	150.000 .000	-	140.42 3.000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-
		6	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPI MDA)		Terkendalinya Kondusifitas Wilayah	-	-	-	-	1.066.3 10.770	-	-	1.049.7 73.270	1.066.3 10.770	1.066.3 10.770	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Capaian Perangkat Daerah Tahun Ke-					
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	Koordinasi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah			Meningkatnya Peran Pemda dan Partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum	-	-	-	-	209.513.833	-	-	-	-	209.513.833	-	-	-	-	1.00	
	8	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKAM)			Terciptanya Keamanan dan Pencegahan ATHG	-	-	-	-	175.161.436	-	-	-	-	175.161.436	-	-	-	-	1.00	
	9	Pengawasan orang asing dan Lembaga Asing			Terlaksananya koordinasi aparat pengawasan orang asing & lembaga Asing	32.562.000	32.562.000	32.562.000	32.562.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Capaian Perangkat Daerah Tahun Ke-					
						(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	(1) Th. 2016	(2) Th. 2017	(3) Th. 2018	(4) Th. 2019	(5) Th. 2020	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
VI I	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1	Penyuluhan kepada masyarakat.			Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.	27.448.000	27.448.000	27.448.000	27.448.000	68.997.900	19.685.320	27.448.045	66.874.195	28.577.945	68.997.900	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		2	Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik.			Terciptanya kesadaran pemahaman dalam berpolitik anatar parpol.	34.139.000	34.139.000	34.139.000	34.139.000	56.111.800	19.577.100	33.960.950	62.995.750	20.660.800	56.111.800	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		3	Verifikasi Persyaratan adm. Pengajuan Bantuan Keuangan parpol.			Terwujudnya kelengkapan administrasi dan realisasi bantuan keuangan parpol.	55.135.000	55.135.000	55.135.000	55.135.000	103.591.845	55.337.745	65.719.238	103.007.438	70.829.245	103.591.845	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Capaian Perangkat Daerah Tahun Ke-				
						(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	(1) Thn 2016	(2) Thn 2017	(3) Thn 2018	(4) Thn 2019	(5) Tahun 2020
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	4	Pembinaan Penyelenggaraan Pemilu Kda Gubernur dan Wakil Gubernur			Terpantaunya Peaksanaan Pemilu dan Pilkada	-	-	50.000.000	50.000.000	-	-	-	104.369.341	-	-	-	-	1.00	1.00	-
	5	Sosialisasi Undang-Undang Pemilu			Terlaksananya sosialisasi Undang-undang Pemilu	-	-	65.106.670	-	-	-	-	65.106.670	-	-	-	-	1.00	-	-
	6	Penyusunan Data Base Partai Politik.			Tersedianya Data-data Parpol.	-	-	10.000.000	32.083.926	-	-	-	-	32.083.926	-	1.00	1.00	1.00	1.00	
	7	Fasilitasi, Koordinasi Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres			Terciptanya pileg yang Jujur dan Adil	-	-	-	149.280.870	-	-	-	-	149.280.870	-	-	-	-	1.00	-
	8	Monitoring Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Terciptanya Pemilukada yang Jujur dan Adil	-	-	-	-	149.280.870	-	-	-	-	149.280.870	-	-	-	-	1.00

Tabel T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020

NO	URAIAN		ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE-					Rata-Rata Pertumbuhan (%)		
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	(1) Thn 2016	(2) Thn 2017	(3) Thn 2018	(4) Thn 2019	(5) Thn 2020	(1) Thn 2016	(2) Thn 2017	(3) Thn 2018	(4) Thn 2019	(5) Thn 2020			
			Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.971.000	9.240.000	18.317.954	9.804.000	20.717.954	5.583.854	8.970.954	18.317.954	5.362.565	20.717.954	62	97	1.00	54	1.00		
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	14.669.000	15.109.000	16.897.089	44.268.800	24.268.800	10.888.859	11.738.545	16.897.089	44.268.800	24.268.800	74	78	1.00	1.00	1.00		
		3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	55.639.000	57.308.000	59.027.000	60.798.000	62.622.000	31.793.263	43.677.211	21.387.287	23.886.855	46.376.273	57	76	36	89	74		
		4	Penyediaan jasa administrasi Keuangan	76.543.000	78.839.000	81.204.000	83.640.000	86.149.000	60.220.000	77.542.653	76.837.633	77.737.633	77.737.633	79	1.00	95	93	90		

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE-					Rata-Rata Pertumbuhan (%)		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	(1) Thn 2016	(2) Thn 2017	(3) Thn 2018	(4) Thn 2019	(5) Thn 2020	(1) Thn 2016	(2) Thn 2017	(3) Thn 2018	(4) Thn 2019	(5) Thn 2020			
		Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.837.000	2.922.000	3.010.000	3.100.000	3.193.000	2.500.000	2.836.649	2.935.849	3.740.849	2.935.849	88	97	98	1.00	92		
	6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	5.000.000	5.150.000	5.305.000	6.000.000	7.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	60	97	94	1.00	1.00		
	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penyerangan bangunan kantor	2.578.000	2.655.000	2.735.000	2.817.000	2.902.000	1.500.950	2.577.750	1.916.450	2.916.450	1.916.450	58	97	70	1.00	66		
	8	Penyediaan Bahan Bacaan&Peneratur Perundangan-Undangan	4.242.000	4.370.000	4.500.000	4.635.000	4.774.000	3.640.000	3.280.000	3.440.000	4.242.000	4.242.000	86	75	76	91	89		
	9	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	141.339.449	147.417.803	112.334.660	105.615.000	149.555.803	141.339.449	147.417.803	112.334.660	87.525.803	149.555.803	1.00	1.00	1.00	83	1.00		

NO	URAIAN		ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE-					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	(1) Thn 2016	(2) Thn 2017	(3) Thn 2018	(4) Thn 2019	(5) Thn 2020	(1) Thn 2016	(2) Thn 2017	(3) Thn 2018	(4) Thn 2019	(5) Thn 2020		
			Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		ke luar daerah																	
ii	Program Penilaian Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pengadaan Perengkapan gedung kantor	31.929.000	31.929.000	31.929.000	31.929.000	55.000.000	30.769.038	25.095.163	13.915.563	25.015.563	55.000.000	97	79	44	79	1.00	
		2	Pengadaan Mebebelur	52.533.000	52.533.000	52.533.000	52.533.000	52.533.000	52.056.400	-	-	35.973.750	35.973.750	99	-	-	68	68	
		3	Pengadaan komputer	46.536.000	46.536.000	46.536.000	60.276.050	60.276.000	45.652.760	27.357.885	-	60.276.050	60.276.000	98	56	-	1.00	1.00	
		4	Rehabilitasi gedung/beratrumah/gedung kantor	42.125.000	42.125.000	42.125.000	42.125.000	119.901.285	42.124.543	13.690.543	-	-	119.901.285	1.00	82	-	-	1.00	

NO	URAIAN		ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE-					Rata-Rata Pertumbuhan (%)		
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	(1) Thn 2016	(2) Thn 2017	(3) Thn 2018	(4) Thn 2019	(5) Thn 2020	(1) Thn 2016	(2) Thn 2017	(3) Thn 2018	(4) Thn 2019	(5) Thn 2020			
			Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Anggaran	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
III	Program Penilaian Kinerja dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.194.310	2.615.000	2.615.000	14.009.885	15.214.685	3.194.310	2.569.685	2.614.685	14.009.885	15.214.685	1.00	98	1.00	1.00	1.00		
		2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	10.622.409	6.763.000	6.763.000	6.763.000	6.763.000	10.622.409	2.658.050	1.681.050	860.550	1.681.050	1.00	39	25	13	25		

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE-					Rata-Rata Pertumbuhan (%)			
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	(1) Thn 2016	(2) Thn 2017	(3) Thn 2018	(4) Thn 2019	(5) Thn 2020	(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	Anggaran	Realisasi		
		Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	3	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	2.577.000	2.577.000	2.577.000	2.577.000	2.577.000	2.454.776	2.576.640	1.916.640	1.270.640	1.918.640	95	1.00	74	49	74			
	4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	22.849.000	22.849.000	27.329.248	22.849.000	27.329.248	22.489.176	22.839.248	27.329.248	18.579.248	27.329.248	98	1.00	1.00	81	1.00			
IV	Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1	Penyusunan RKA/DP A SKPD	21.510.715	20.831.000	25.703.370	25.707.245	56.903.370	21.510.715	14.235.235	25.703.370	25.707.245	56.903.370	1.00	68	1.00	1.00	1.00		
	2	Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan SKPD	7.364.000	13.768.955	18.493.978	30.318.078	36.318.078	6.081.378	13.768.955	18.493.978	30.318.078	36.318.078	82	1.00	1.00	1.00	1.00			

NO	URAIAN		ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE-					Rata-Rata Pertumbuhan (%)		
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	(1) Thn 2016	(2) Thn 2017	(3) Thn 2018	(4) Thn 2019	(5) Thn 2020	(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020			
			Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
V	Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	24.870.067	22.777.000	22.777.000	28.338.967	28.384.567	24.870.067	22.316.667	16.008.955	28.338.967	28.384.567	1.00	98	70	1.00	1.00		
		2	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat.	19.130.015	11.847.000	12.011.565	11.847.000	26.849.515	19.130.015	11.629.065	12.011.565	10.389.515	26.849.515	1.00	98	1.00	88	1.00		
		3	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Luhur Budaya Bangsa.	22.823.008	11.847.000	12.277.058	15.049.158	30.062.508	22.823.008	11.847.058	12.277.058	15.049.158	30.062.508	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE-					Rata-Rata Pertumbuhan (%)		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	(1) Thn 2016	(2) Thn 2017	(3) Thn 2018	(4) Thn 2019	(5) Thn 2020	(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	Angg ara n	Real isasi	
		Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4	Pembi naan Forum Kewas pad aan Dini Masya rakat FKDM	55.218 .385	27.009 .000	31.167. 426	90.965. 710	65.638. 210	55.218 .385	26.018 .826	31.167. 426	90.965. 710	65.638. 210	1.00	96	1.00	1.00	1.00		
	5	Monit oring, Pemb inaan dan Pendaf taran Ormas dan LSM.	85.036 .082	41.083 .159	114.72 0.459	94.931. 859	91.376. 055	85.036 .082	41.083 .159	114.72 0.459	94.931. 859	91.376. 055	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
	6	Pembi naan Kesad araan Bela Negara	19.169 .650	9.782. 700	11.912. 700	12.266. 850	28.838. 150	19.169 .650	9.782. 700	11.912. 700	12.266. 850	28.838. 150	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
	7	Fasilit asi, Koordi nasi dan Pemb inaa n FKUB	16.342 .000	16.342 .000	18.748. 550	29.685. 425	35.150. 925	16.264 050	16.265 475	18.748. 550	29.685. 425	35.150. 925	99	99	1.00	1.00	1.00		

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE-					Rata-Rata Pertumbuhan (%)		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	(1) Thn 2016	(2) Thn 2017	(3) Thn 2018	(4) Thn 2019	(5) Thn 2020	(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	Angg	Real	
		Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	garan	isasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	8	Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila	17.322.125	10.908.725	11.814.225	16.701.175	28.769.175	17.322.125	10.908.725	11.814.225	16.701.175	28.769.175	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
	9	Pembentukan Pusat Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	122.987.000	-	-	-	-	-	-	18.748.550	24.923.000	117.382.826	-	-	-	-	-		
	10	Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan	17.157.000	-	-	-	-	-	-	18.895.200	18.679.150	29.663.150	-	-	-	-	-		
	11	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	10.909.000	10.909.000	10.909.000	28.626.322	-	-	-	-	28.626.322	-	-	-	-	1.00		

NO	URAIAN		ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE-					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	(1) Thn 2016	(2) Thn 2017	(3) Thn 2018	(4) Thn 2019	(5) Thn 2020	(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020		
			Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
VI	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1	Pelaksanaan kirab Pataka	124.527.000	122.987.000	122.987.000	122.987.000	122.987.000	99.541.964	122.699.864	-	-	-	80	1.00	-	-	-	-
		2	Monitoring ketahanan sumber Daya Alam perdagangan dan ekonomi.	40.937.160	17.157.000	26.227.160	43.407.185	43.407.185	40.937.160	12.352.110	26.227.160	43.407.185	43.407.185	1.00	72	1.00	1.00	1.00	-
		3	Koordinasi Intelijen Daerah (Kominda)	117.912.433	182.684.783	307.587.624	107.870.000	107.870.000	117.912.433	182.684.783	307.587.624	-	-	1.00	1.00	1.00	-	-	-
		4	Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	86.492.000	86.492.000	86.492.000	86.492.000	86.492.000	75.856.136	73.640.036	80.518.036	68.522.536	77.372.536	88	85	93	79	89	-

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE-					Rata-Rata Pertumbuhan (%)		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	(1) Thn 2016	(2) Thn 2017	(3) Thn 2018	(4) Thn 2019	(5) Thn 2020	(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	Angg ara n	Real isasi	
		Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	5	Pembangunan Pos Jaga Terpadu	150.00 0.000	150.00 0.000	150.00 0.000	150.00 0.000	150.00 0.000	140.42 3.000	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-
	6	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPI MDA)	-	-	-	-	-	-	-	1.049.7 73.270	1.066.3 10.770	1.066.3 10.770	-	-	-	-	-	-	-
	7	Koordinasi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.51 3.833	-	-	-	-	-	-	-
	8	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKAM)	-	-	-	-	175.16 1.436	-	-	-	-	175.16 1.436	-	-	-	-	1.00	-	-
	9	Pengawasan orang asing dan lembaga asing	32.562 .000	32.562 .000	32.562. 000	32.562. 000	32.562. 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN		ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE-					Rata-Rata Pertumbuhan (%)		
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	(1) Thn 2016	(2) Thn 2017	(3) Thn 2018	(4) Thn 2019	(5) Thn 2020	(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020			
			Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
VII	Program Pendiri dikan Politik Masyarakat	1	Penyuluhan kepada masyarakat.	27.448.000	27.448.000	66.874.195	28.577.945	68.997.900	19.685.320	27.448.045	66.874.195	28.577.945	68.997.900	72	1.00	1.00	1.00	1.00		
		2	Koordinasi Forum-forum diskusi Politik.	34.139.000	34.139.000	62.995.750	34.139.000	56.111.800	19.577.100	33.960.950	62.995.750	20.660.800	56.111.800	57	99	1.00	60	1.00		
		3	Verifikasi persyaratan adm. Pengajuan bantuan keuangan parpol.	55.337.745	65.719.238	103.007.438	70.829.245	103.591.845	55.337.745	65.719.238	103.007.438	70.829.245	103.591.845	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE-					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	(1) Thn 2016	(2) Thn 2017	(3) Thn 2018	(4) Thn 2019	(5) Thn 2020	(1) Tahun 2016	(2) Tahun 2017	(3) Tahun 2018	(4) Tahun 2019	(5) Tahun 2020	Angg	Realisasi
		Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Realisasi & Anggaran	Angg	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	5	Sosialisasi Undang-Undang Pemilu	-	-	65.106.670	-	-	-	65.106.670	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-
	6	Penyusunan Data Base Partai Politik	-	-	10.000.000	32.083.926	-	-	-	32.083.926	-	-	-	-	1.00	-	-	-
	7	Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres	-	-	-	149.280.870	-	-	-	149.280.870	-	-	-	-	1.00	-	-	-
	8	Monitoring Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	149.280.870	-	-	-	149.280.870	-	-	-	-	1.00	-	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat, diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

1. Kondisi Internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu:

- a. Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang kurang memadai di bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan ekonomi sosial budaya.
- b. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan ekonomi sosial budaya yang belum sepenuhnya optimal.
- c. Sumber daya aparatur yang tidak ditunjang dengan diklat teknis dan diklat fungsional sehingga menyebabkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum optimal.
- d. Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

2. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal:

- a. Mobilitas penduduk antar wilayah kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi yang mengakibatkan kesulitan untuk memonitoring aktivitas penduduk secara optimal.
- b. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah.
- c. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi.
- d. Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak (lingkungan) sosial masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal dan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di masyarakat.
- e. Tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat.
- f. Kondisi geografis di beberapa wilayah di kabupaten Sumbawa, seperti daerah pegunungan, kepulauan luar, daerah terpencil dan daerah perbatasan, yang bisa menghambat akses Pemerintah Daerah untuk memantau kegiatan masyarakat yang berpotensi membahayakan kesatuan bangsa dan politik masyarakat.
- g. Kebijakan liberalisasi politik yang membuka peluang masuknya ideologi politik asing yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.
- h. Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya (*distrust*) pada proses hukum.
- i. Regulasi politik yang sering berubah dan proses politik, khususnya pelaksanaan pemilu dan pilkada, yang terlalu sering kuantitasnya sehingga menimbulkan kejenuhan serta ketidakpastian di masyarakat.

3. Peluang

Peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa dalam lima tahun ke depan adalah:

- 2.4.1.1. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undang politik, wacana penyelenggaraan sistem pilkada serentak, dan wacana pemilihan Bupati oleh DPRD. Adanya wacana dari Pemerintah Pusat untuk membuat undang-undang tentang kerukunan umat beragama, serta undang-undang tentang ormas yang bisa berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat. Adanya kesamaan, keterkaitan dan keselarasan visi dan misi kepala daerah Kabupaten Sumbawa dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026 yaitu :*"Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban"*, khususnya misi ke-3, SUMBAWA BERSIH DAN MELAYANI; yaitu Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih(anti korupsi)cepat dan bermutu,memberikan kepastian serta peelayanan yang cepat dan efisien. dan ke-4, yaitu "SUMBAWA AMAN DAN BERBUDAYA; Muwujudkan masyarakat yang beriman,berkarakter,terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum dan terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.
- 2.4.1.2. Adanya peluang dukungan dana dari APBD/APBN serta lembaga donor lain yang tidak mengikat untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan ekonomi sosial budaya.
- 2.4.1.3. Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam LSM, Ormas, OKP dan Perguruan Tinggi terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam bentuk kritik, saran dan kerjasama dalam bidang politik, kesatuan bangsa dan wawasan kebangsaan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Sumbawa pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan adalah:

Tabel T-B. 35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Masih terdapatnya potensi konflik di masyarakat	Banyaknya konflik yang terjadi dimasyarakat	Konflik antar masyarakat Ipoletksosbudhankam
2	Masih tingginya penyebaran Narkotika dan Prekursor Narkotika	Belum optimalnya pencegahan dan penanganan P4GN Kab. Sumbawa	Kurangnya Sosialisasi dan Penanganan terhadap bahaya P4GN Kab. Sumbawa
3	Belum optimalnya partisipasi politik di masyarakat	Kesadaran Politik Masyarakat masih rendah	Kurangnya penyuluhan kesadaran politik masyarakat
4	Terdapat gejala menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila di masyarakat	Kuatnya arus Globalisasi dan transportasi budaya	Kurangnya pembinaan terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila ditengah-tengah masyarakat
5	Belum Optimalnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Banyak Organisasi masyarakat yang tidak aktif	Kurangnya pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 yaitu *Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban*. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dirumuskan lima misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Sumbawa Sehat Dan Cerdas;
Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daerah yang maju melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan .
2. Sumbawa Sejahtera Dan Mandiri;
Mempercepat penurunan kemiskinan,meningkatkan nilai tambah sektor agribisnis,industri dan pariwisata.

3. Sumbawa Bersih Dan Melayani;
Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih(anti korupsi)cepat dan bermutu,memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien.
4. Sumbawa Aman Dan Berbudaya;
Mewujudkan masyarakat yang beriman, berkarakter, terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum dan terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.
5. Sumbawa Tangguh Dan Berkelanjutan;
Pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Dari lima misi tersebut, Badan Kesbangpol Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas melaksanakan misi ke-3 dan ke-4 dengan sasaran dan indikator sasaran sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5	6
1.	Misi 3 : Sumbawa Bersih dan Melayani <i>Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang bersih(anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien.</i>	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan sub urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi.	Persentase Peningkatan Nilai RB	Meningkatnya Kinerja Badan kesbangpol	Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Badan Kesbangpol
2.	Misi 4: Sumbawa Aman dan Berbudaya Mewujudkan masyarakat yang beriman, berkarakter, terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum dan terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.	Meningkatkan Cakupan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Capaian Kinerja Penanganan Konflik Sosial.	Menurunnya Jumlah Konflik masyarakat bidang Ideologi, Politik, Ekonomi , sosial Budaya dan Pertahanan dan Kemananan	Persentase capaian kinerja penanganan Konflik masyarakat bidang Ideologi, Politik, Ekonomi , sosial Budaya dan Pertahanan dan Kemananan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Telaahan Renstra Kementerian Republik Indonesia. Visi Rencana Strategis Kementerian Republik Indonesia Tahun 2015-2020 yaitu "Kementerian Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik, Meningkatnya Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa". Untuk mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas .
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Dari misi Renstra Kemen tersebut yang sesuai dengan bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan ekonomi sosial budaya adalah misi ke-1 yaitu "Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas". Sejalan dengan visi dan misi yaitu "Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas". Telah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu "Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara". Untuk mendukung tujuan tersebut, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program, yaitu :

1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

3.4 TELAAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTB 2013-2018

Visi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTB Tahun 2013-2018 adalah: "Terwujudnya kondisi masyarakat NTB yang kondusif, toleran dan tertib". Untuk mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan sumber daya dalam rangka mendukung kinerja SKPD;
2. Meningkatkan keterpaduan pengembangankesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara;
3. Meningkatkan keterpaduan, keserasian dan kesinambungan pengembangan kehidupan berpolitik;
4. Meningkatkan keterpaduan, keserasian dan kesinambungan pemantapan stabilitas keamanan di daerah.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, telah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatkan kerukunan dan keharmonisan masyarakat;
2. Meningkatkan partisipasi dan kewaspadaan masyarakat dalam bela Negara;
3. Meningkatkan kualitas kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik;
4. Meningkatkan efektifitas fasilitasi ormas/orpol dan pemilu;

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program, yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam "Meningkatkan kerukunan dan keharmonisan masyarakat", adalah: Terwujudnya masyarakat yang tertib.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam "Meningkatkan partisipasi dan kewaspadaan masyarakat dalam bela negara", adalah:
 - a. Terwujudnya pembinaan dan pelatihan bela Negara;
 - b. Terwujudnya kehidupan masyarakat berlandaskan empat pilar kebangsaan (Pancasila, Binneka Tunggal Ika, UUD 1945 dan NKRI).
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam "Meningkatkan kualitas kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik", adalah:
 - a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik;
 - b. Terwujudnya organisasi masyarakat dan organisasi politik yang aspiratif.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam "Meningkatkan efektifitas fasilitasi ormas/orpol dan pemilu", adalah: Terwujudnya pembinaan dan fasilitasi terhadap parpol/ormas.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Provinsi NTB, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi NTB untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Potensi konflik dan kerawanan sosialancam instabilitas
2. Prevalensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba
3. Optimalisasi implementasi makna wawasan kebangsaan dan bela negara dalam kehidupan masyarakat
4. Optimalisasi peran Ormas dan Parpol dalam pembangunan
5. Ketersediaan sumberdaya aparatur guna pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (2021 – 2026)

Sasaran dan indikator sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa jangka menengah diuraikan dalam tabel T-C. 25 berikut ini.

Tabel T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan / sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Cakupan Penanganan Konflik Sosial dengan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi.		Nilai RB	51,32	51,91	52,5	55,0	57,5
		Meningkatnya Kinerja Badan kesbangpol	Kategori predikat hasil evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	B	BB	BB	BB	BB
			Capaian Kinerja Penangan Konflik Sosial	100	100	100	100	100
		Tertanganinya seluruh bidang konflik masyarakat di daerah	capaian kinerja penanganan Konflik masyarakat (bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, sosial Budaya dan Pertahanan dan Keamanan)	100	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan ekonomi sosial budaya, maka strategi dan kebijakan Badan Kesbangpol Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

Tabel T.C-26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban			
Misi3 : Sumbawa Bersih dan Melayani Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Cakupan Penanganan Konflik dengan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi.	Meningkatnya Kinerja Badan kesbangpol	Peningkatan Kategori predikat hasil evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	Penguatan AKIP Perangkat Daerah
Misi4 : Sumbawa Aman dan Berbudaya Mewujudkan masyarakat yang beriman, berkarakter, terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum dan terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Tertanganinya seluruh bidang konflik masyarakat di daerah	Persentase capaian kinerja penanganan Konflik masyarakat (bidang Ideologi, Politik, Ekonomi , sosial Budaya dan Pertahanan dan Kemananan)	Pelaksanaan Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
			Pelaksanaan survey indeks Demokrasi Indonesia dan fasilitasi Partai Politik serta pengembangan etika budaya politik
			Pelaksanaan verifikasi ormas dan pembinaan ormas untuk berperan dalam pembangunan
			Melaksanakan Koordinasi Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah

			Melaksanakan/memantapkan Kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan forum pimpinan daerah dalam penanganan konflik di daerah.
--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu pada Pasal 1 yang menyebutkan bahwa program merupakan suatu penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diperbarui melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program pembangunan daerah yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa merupakan program pembangunan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 sebagaimana disebutkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.

Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program dan kegiatan sehingga lebih mudah untuk diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Selanjutnya setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan yang merupakan serangkaian aktivitas belanja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) dalam rangka mencapai keluaran (*output*) suatu kegiatan. Secara garis besar dalam rangka melaksanakan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa maka dituangkan dari Tabel Berikut :

TABEL T-C.27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)					
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Meningkatkan Cakupan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi.				Penanganan Konflik Sosial dengan Reformasi Birokrasi.	Nilai RB	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi.	Nilai	n/a	51,32	2.944.060.454	51,91	2.742.247.132	52,50	3.814.642.434	55,00	4.190.706.680	57,50	4.604.377.347	57,50	4.604.377.347		
	Meningkatnya Kinerja Badan kesbangpol					Kategori predikat hasil evaluasi AKIP Badan Kesbangpol		Kategori	B	B	2.944.060.454	BB	2.742.247.132	BB	3.814.642.434	BB	4.190.706.680	BB	4.604.377.347	BB	4.604.377.347		
		04:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Nilai AKIP Badan Kesbangpol	Meningkatnya Nilai AKIP Kesbangpol	Nilai	69,75	69,78	2.944.060.454	70,11	2.742.247.132	70,23	3.814.642.434	70,33	4.190.706.680	70,43	4.604.377.347	70,43	4.604.377.347	Bakesbangpol	
		4.01.01.2.13			Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang disusun	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Dokumen	-	1	18.874.524	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	-	1	18.874.524	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)					
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		8.01.0 1.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	8	77.710.754	8	80.422.388	8	115.240.758	8	126.764.835	8	139.441.319	8	139.441.319		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	2	36.670.770	2	40.665.700	2	65.475.429	2	72.022.973	2	79.225.270	2	79.225.270		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	6.994.400	1	7.692.900	1	8.462.190	1	9.308.409	1	10.239.250	1	10.239.250		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	6.902.556	1	5.983.050	1	8.462.190	1	9.308.409	1	10.239.250	1	10.239.250		
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	1	1	7.099.556	1	6.184.050	1	8.583.472	1	9.441.819	1	10.386.001	1	10.386.001		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)							
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
						SKPD	Dokumen DPA-SKPD																		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	7.099.274	1	7.616.050	1	8.590.131	1	9.449.144	1	10.394.059	1	10.394.059				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	7.949.374	1	7.282.338	1	9.624.140	1	10.586.554	1	11.645.209	1	11.645.209				
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	4.994.824	1	4.998.300	1	6.043.206	1	6.647.527	1	7.312.280	1	7.312.280				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)					
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		8.01.0 1.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Tersedianya dokumen administrasi keuangan Kesbangpol	Dokumen	42	42	2.297.67 2.977	41	2.291.8 15.217	42	2.529.59 6.504	42	2.777.15 6.156	42	3.049.47 1.772	42	3.049.47 1.772			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	18	18	2.219.24 1.361	18	2.219.2 41.367	18	2.441.16 5.497	18	2.685.28 2.047	18	2.953.81 0.252	18	2.953.81 0.252			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	54.000.0 00	12	54.000. 000	12	54.000.0 00	12	54.000.0 00	12	54.000.0 00	12	54.000.0 00			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	4.915.31 2,00	1	2.300.0 00	1	2.970.00 0	1	3.267.00 0	1	3.593.70 0	1	3.593.70 0			
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	4.957.12 4,00	0	-	1	5.997.99 6	1	6.597.79 6	1	7.257.57 6	1	7.257.57 6			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	3.290.50 0	1	4.975.0 00	1	7.427.09 0	1	8.169.79 9	1	8.986.77 9	1	8.986.77 9			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)					
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	4	4	4.999.968	4	3.685.450	4	6.049.745	4	6.654.719	4	7.320.191	4	7.320.191		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	4	1.279.900	4	4.548.550	4	5.947.383	4	6.542.122	4	7.196.334	4	7.196.334		
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	4.988.812	1	3.064.850	1	6.038.793	1	6.642.673	1	7.306.940	1	7.306.940		
		8.01.0 1.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pengadministrasian BMD pada PD yang disusun	Tersedianya dokumen administrasi BMD kesbangpol	Dokumen	1	1	8.476.218	1	8.333.000	1	10.256.224	1	11.281.846	1	12.410.031	1	12.410.031			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)					
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	8.476.218	1	8.333.000	1	10.256.224	1	11.281.846	1	12.410.031	1	12.410.031		
		8.01.0 1.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian PD yang disusun	Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian kesbangpol	Dokumen	1	1	49.504.706	1	41.200.000	1	59.900.695	1	65.890.764	1	72.479.840	1	72.479.840			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan	Dokumen	1	1	49.504.706	1	41.200.000	1	59.900.695	1	65.890.764	1	72.479.840	1	72.479.840			
		8.01.0 1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum PD yang disusun	Tersedianya dokumen administrasi umum Kesbangpol	Dokumen	40	40	199.897.984	41	89.075.632	41	551.308.216	41	606.439.038	41	667.082.941	41	667.082.941			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	1	1	2.910.922	1	3.583.832	1	3850000	1	4.235.000	1	4.658.500	1	4.658.500			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)					
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	1	1	57.599.624	1	8.741.800	1	284.315.735	1	312.747.309	1	344.022.039	1	344.022.039		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	paket	1	1	4.999.488	2	5.275.000	2	6.049.381	2	6.654.319	2	7.319.751	2	7.319.751		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	12	12	4.380.000	12	6.060.000	12	6.666.000	12	7.332.600	12	8.065.860	12	8.065.860		
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	4.999.750	12	9.420.000	12	10.362.000	12	11.398.200	12	12.538.020	12	12.538.020		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	89.759.700	12	51.490.000	12	145.245.100	12	159.769.610	12	175.746.571	12	175.746.571		
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	35.248.500	1	4.505.000	1	94.820.000	1	104.302.000	1	114.732.200	1	114.732.200		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)					
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		8.01.0 1.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah.	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD yang disusun	Tersedianya dokumen pengadaan BMD Penunjang Urusan Kesbangpol	Dokumen	4	4	45.588.400	5	57.333.367	8	114.147.685	9	125.562.454	11	138.118.699	11	138.118.699			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Mebel	Unit	2	2	15.489.400,00	2	8.701.000	4	31.007.900	4	34.108.690	5	37.519.559	5	37.519.559			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	2	2	30.099.000	3	48.632.367	4	83.139.785	5	91.453.764	6	100.599.140	6	100.599.140			
		8.01.0 1.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang disusun	Tersedianya dokumen jasa penunjang urusan Kesbangpol	Dokumen	403	403	86.031.952	405	60.209.328	407	99.139.738	408	109.053.711	409	119.959.082	409	119.959.082			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	365	365	2.799.927	367	5.638.003	369	6.600.000	370	7.260.000	371	7.986.000	371	7.986.000			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	4	4	33.000.000	4	25.800.000	4	36.300.000	4	39.930.000	4	43.923.000	4	43.923.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)					
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	laporan	11	11	40.500.000	11	20.494.800	11	44.463.987	11	48.910.385	11	53.801.424	11	53.801.424		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	23	23	9.732.025	23	8.276.525	23	11.775.751	23	12.953.326	23	14.248.658	23	14.248.658		
		8.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD yang disusun	Tersedianya dokumen pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Kesbangpol	Dokumen	8	8	160.302.939	6	113.858.200	8	335.052.614	8	368.557.876	8	405.413.663	8	405.413.663		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	5	5	52.025.562	5	48.748.750	5	66.648.065	5	73.312.872	5	80.644.159	5	80.644.159		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	1	70.729.930	1	65.109.450	1	85.583.215	1	94.141.537	1	103.555.691	1	103.555.691		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)					
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1	32.566.667	0		1	94.685.642	1	104.154.206	1	114.569.626	1	114.569.626		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1	4.980.780	0		1	88.135.692	1	96.949.261	1	106.644.187	1	106.644.187		
						Capaian Kinerja Penanganan Konflik Sosial		%	100	100	3.974.772.943	100	2.760.604.972	100	8.600.228.645	100	9.190.167.533	100	9.949.979.734	100	9.949.979.734	Kaban	
					Tertanganinya seluruh bidang konflik masyarakat di daerah	capaian kinerja penanganan Konflik masyarakat (bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, sosial Budaya dan Pertahanan dan Keamanan)		%	100	100	3.974.772.943	100	2.760.604.972	100	8.600.228.645	100	9.190.167.533	100	9.949.979.734	100	9.949.979.734		
		8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.		Persentase Capaian Kinerja pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	menguatnya Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di daerah	%	100	100	332.498.630	100	7.552.650	100	1.856.323.342	100	1.956.323.342	100	2.008.451.126	100	2.008.451.126			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)					
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		8.01.0 2.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.		Jumlah unsur masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan	Terlaksananya pembinaan terhadap unsur masyarakat/ kelompok masyarakat	Orang	100	10	332.498.630	10	7.552.650	10	1.856.323.342	10	1.956.323.342	10	2.008.450.1126	10	2.008.450.1126		
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun.	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	0	0		0	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun.	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	0	0		0	0	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)					
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	0	0	0	0	0	50	182.000.000,00	50	182.000.000,00	50	182.000.000,00	50	182.000.000,00		
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	100	100	180.874.904	30	7.552.650	155	1.301.161.671	155	1.361.045.504	155	1.361.045.504	155	1.361.045.504		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)					
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Dokumen Laporan hasil pelaksanaan Monitoring evaluasi di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	laporan	1	1	151.623.726	0		1	201.161.671	1	221.277.838	1	243.405.622	1	243.405.622		
					Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	0	0		0		50	150.000.000	50	170.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)					
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		8.01.03			Program Peningkatan Peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.	Persentase Capaian kinerja Peningkatan Peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Meningkatnya kinerjanya peran parpol dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.	%	100	10	1.189.220	10	1.271.997.713	10	2.133.480	10	2.175.980.293	10	2.381.478.323	10	2.381.478.323		
		8.01.03.2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	Jumlah Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yg disusun	tersusunnya Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Dokumen	3	3	1.189.220	3	1.271.997.713	3	2.133.480	3	2.175.980.293	3	2.381.478.323	3	2.381.478.323		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)						
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
					Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17000000	1	17.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)						
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17000000	1	17.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi						
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)											
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
					Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	120	120	0	1.189.224.707	100	0	1.271.997.713	100	0	1.300.000.000	100	0	1.304.980.293	100	0	1.460.478.323	100	0	1.460.478.323		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)					
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	0	0	0	0	0	50	87.000.000,00	50	87.000.000,00	50	87.000.000,00	50	87.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)					
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	21	22		
					Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	0	0		0		1	712.483.578	1	750.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000		
		8.01.04	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.		Persentase Capaian kinerja pemberdayaan dan pengawasan Ormas	terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan ormas	%	100	100	177.250.406	100	33.201.131	100	281.385.548	100	304.424.102	100	329.766.512	100	329.766.512			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)					
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		8.01.0 4.2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dirumuskan	Tersedianya rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Dokumen	1	1	177.250.406	1	33.201.131	1	281.385.548	1	304.424.102	1	329.766.512	1	329.766.512		
					Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen	0	0	-	0	-	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)					
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000		
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	50	50	177.250.406,00	50	33.201.131,00	50	115.192.774,00	50	126.712.051,00	50	139.383.256,00	50	139.383.256,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)					
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	0	0	-	0	-	50	115.192.774,00	50	126.712.051,00	50	139.383.256,00	50	139.383.256,00		
					Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	0	0	-	0	-	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)						
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.			Presentase capaian kinerja Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Terselenggaranya secara optimal Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.	%	100	10	192.700.114	10	38.984.428	10	309.887.137	10	337.475.851	10	377.823.436	10	377.823.436			
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.			Jumlah Dokumen hasil Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya yang disusun.	Tersedianya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di daerah	Dokumen	2	2	192.700.114	2	38.984.428	2	309.887.137	2	337.475.851	2	377.823.436	2	377.823.436			
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)						
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun.	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00		
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	0	0	0	0	0	50	42.720.000,00	50	46.992.000,00	50	61.691.200,00	50	61.691.200,00			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)					
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	50	50	42.720.000	80	38.984.428	100	51.691.200	100	56.860.320	100	62.546.352	100	62.546.352		
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	1	1	149.980.114	0		1	181.475.937	1	199.623.531	1	219.585.884	1	219.585.884		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)					
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		8.01.06			Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.	Persentase capaian kinerja kewaspadaan dan penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya kewaspadaan Dini Daerah dan penanganan konflik sosial di daerah	%	100	10	2.083.090	10	1.408.869.050	10	4.019.140	10	4.415.963.945	10	4.852.460.337	10	4.852.460.337		
		8.01.06.2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	Tersedianya hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di daerah	Dokumen	2	2	2.083.090.9086	2	1.408.869.050	2	4.019.140.9040	2	4.415.963.945	2	4.852.460.337	2	4.852.460.337		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)					
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	0	0	-	0	-	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)					
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Pemantauan Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	0	0		0		1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)					
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	23	23	237.484.298	23	26.311.950	25	291.240.345	25	320.364.380	25	352.400.817	25	352.400.817		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)					
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	34	34	99.493.556	34	41.144.550	36	859.579.552	39	945.537.507	40	1.040.091.257	40	1.040.091.257		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3(2023)		Tahun-4(2024)		Tahun-5(2025)						
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	0	0	0	0	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000		
					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	1.746.121.232	2	1.341.412.550	2	2.817.329.143	2	3.099.062.058	2	3.408.968.263	2	3.408.968.263			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan sesuai dengan target yang direncanakan. Penetapan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2016 dan untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Sumbawa dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa, tertera pada Tabel T-C.28 sebagai berikut

Tabel T-C. 28
Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Tujuan (x), Sasaran (xx) , Program (xxx)	Kondisi kinerja awal priode RPJMD	Target CapaianSetiapTahun					Kondisi kinerja akhir priode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Nilai RB	a/n	51,32	51,91	52,5	55,0	57,5	57,5
1.1	Kategori predikat hasil evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
1.1.1	Nilai AKIP Badan Kesbangpol	69,75	69,78	70,11	70,23	70,33	70,43	70,43
2.	Capaian Kinerja Penanganan Konflik Sosial	100	100	100	100	100	100	100
2.1	capaian kinerja penanganan Konflik masyarakat (bidang Ideologi, Politik, Ekonomi , sosial Budaya dan Pertahanan dan Kemananan)	100	100	100	100	100	100	100

2.1.1	Persentase Capaian Kinerja pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100	100	100	100	100	100
2.1.2	Persentase Capaian kinerja Peningkatan Peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100	100	100	100	100	100	100
2.1.3	Persentase Capaian kinerja pemberdayaan dan pengawasan Ormas	100	100	100	100	100	100	100
2.1.4	Persentase capaian kinerja Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100	100	100	100	100	100	100
2.1.5	Persentase capaian kinerja kewaspadaan dan penanganan Konflik Sosial	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 disusun sesuai amanat perundang-undangan yang terkait dan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a. Bahwa Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 tetap merupakan implementasi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan sesuai kedudukan, tugas dan fungsi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa. Program dan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan dikendalikan sepenuhnya oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa selaku kepala PD dan dilaksanakan oleh seluruh ASN di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Sumbawa sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa setiap tahunnya sesuai periode Renstra, dengan mengacu kepada RKPD Kabupaten Sumbawa;
- c. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa 2021-2026 dilaksanakan secara akuntabel yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa.

Pelaksanaan program, kegiatan hingga sub kegiatan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam lima tahun ke depan. Terlaksananya seluruh yang direncanakan akan terbangun tata kelola anggaran yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal serta terselenggaranya pelayanan publik yang baik, cepat dan akurat. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 ini merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk berperan aktif dalam penguatan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Sumbawa. Sasaran Rencana Strategis ini fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak.

Target dan sasaran pada Renstra ini meliputi sasaran Kabupaten Sumbawa dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu, setiap unit kerja harus menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing-masing menjadi Rencana Kinerja (Renja) Tahunan. Dokumen ini masih

memungkinkan diadakannya perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan kekurangan-kekurangan dalam perencanaan pembangunan dibidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Sumbawa. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa sehingga dalam pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas.

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH